



Praktik Jebakan Belanja Jadi Sorotan

■ Pemda DIY Imbau Wisatawan Untuk Berani Menolak

YOGYA. TRIBUN - Di tengah lonjakan jumlah kunjungan wisatawan ke DIY pada awal 2026, sejumlah masalah masih perlu dibenahi. Satu diantaranya terkait harga sewa tikar yang tidak wajar (*nuthuk*) serta modus pemaksaan belanja oleh oknum kepada pelanggan.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata DIY, Elyta Shari mengungkapkan, laporan mengenai harga makanan dan sewa tikar yang menjebak wisatawan masih terjadi, terutama ketika tidak ada petugas yang berpatroli.

Selain masalah harga, Elyta juga menyoroti praktik "jebakan" di mana wisatawan diarahkan atau seolah dipaksa oleh oknum pengemudi transportasi lokal untuk mampir ke toko oleh-oleh atau kerajinan tertentu demi mendapatkan komisi.

"Wisatawan itu kan sering ya, mungkin ada di destinasi wisata X, habis itu tahu-tahu diajak ke tempat pengrajin, terus dia merasa 'dipaksa' untuk berbelanja. Kalau seandainya dia sudah masuk jebakan, te lanjut ikut ke tempat pengrajin, ya sudah," katanya.

Elyta pun mengimbau kepada wisatawan untuk berani menolak dan lebih jeli mengenali petugas resmi. "Kalau seandainya memang tidak berniat membeli, tidak tertarik membeli, ya tidak usah membeli," jelasnya.

Dispar DIY mengakui sulitnya memberantas praktik ini

DEMI DAPAT KOMISI

- Pemda DIY soroti modus 'pemaksaan belanja' oleh oknum kepada pelanggan di wilayah DIY.
- Wisatawan seolah dipaksa oknum pengemudi transportasi mampir toko oleh-oleh atau kerajinan.
- Tujuan praktik ini adalah agar oknum pengemudi transportasi bisa mendapatkan komisi.
- Wisatawan diimbau untuk berani menolak dan lebih jeli mengenali petugas resmi.
- Upaya edukasi terus dilakukan, termasuk menyediakan posko aduan TIC.

sepeuhnya karena keterbatasan personel. Namun, upaya edukasi terus dilakukan, termasuk menyediakan posko aduan TIC (*Tourist Information Center*) bagi wisatawan yang merasa dirugikan.

Selain modus pemaksaan belanja, parkir liar dan tarif "nuthuk" masih dikeluhkan wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, meski arus lalu lintas dinilai relatif lancar selama periode tersebut.

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indryanti se-

belumnya mengatakan, persoalan parkir paling banyak disampaikan wisatawan dibandingkan kemacetan. Menurut dia, kelancaran lalu lintas selama Nataru merupakan hasil koordinasi lintas sektor dan dukungan kepolisian.

"Masukan dari wisatawan paling banyak itu soal parkir dan kemacetan. Tapi sebenarnya untuk macet sendiri kemarin sudah lumayan terurai," ujar Ni Made di Yogyakarta, Jumat (2/1).

Kemacetan di sejumlah ruas utama dapat dikendalikan. Namun, praktik parkir liar di kawasan strategis justru masih marak dan memicu keluhan wisatawan, terutama di Jalan Mataram, strip-strip Malioboro dan Jalan Pasar Kembang. Di lokasi tersebut, wisatawan yang tidak memahami area kerap terjebak parkir ilegal dengan tarif di luar ketentuan.

Pemerintah daerah, kata Ni Made, sebenarnya telah menyiapkan berbagai kantong parkir resmi dengan tarif yang jelas. Tujuh kantong parkir utama tersedia di antaranya di TKP Ngabean, TKP Eks Hotel Trio, TKP Beskalan, TKP Menara Kopi, TKP Ketandan, TKP Sriwedari, dan TKP Senopati. Selain itu, Pemkot Yogyakarta menambah kantong parkir di Stadion Kridosono, lahan selatan PLN di Jalan Margo Utomo, serta SMPN 3 Yogyakarta.

Meski demikian, fasilitas tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Banyak masyarakat dan wisatawan masih

memilih parkir di lokasi ilegal, sehingga membuka ruang bagi praktik penarikan tarif berlebihan.

Meskipun masih menemui sejumlah persoalan, sektor pariwisata DIY disebut mencatatkan kinerja positif pada pembuka tahun 2026. Jumlah kunjungan wisatawan selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Hasil rekapitulasi dari 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, total kunjungan wisatawan yang terdara melalui retribusi resmi mencapai lebih dari 2,2 juta orang. Angka ini jauh di atas target moderat yang dipatok sebelumnya di kisaran 1,5 juta hingga 1,7 juta wisatawan.

Elyta kembali menegaskan, angka 2,2 juta tersebut adalah data riil kunjungan ke destinasi bertribusi yang dikelola pemerintah kabupaten/kota (Dispar Kab/Kota).

Angka riil di lapangan diprediksi jauh lebih besar mengingat banyaknya destinasi wisata berbasis masyarakat (Pokdarwis) atau kawasan terbuka seperti Malioboro yang tidak memberikan tiket masuk.

Sebagai perbandingan, pada periode libur akhir tahun 2024, jumlah wisatawan tercatat berada di angka 1,5 juta orang. Kenaikan drastis ini menjadi sinyal kuat pulihnya kepercayaan wisatawan terhadap Yogyakarta sebagai destinasi unggulan nasional. (han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005